

**PENDIDIKAN INVESTASI SDM DAN MASA DEPAN
PEMBANGUNAN BANGSA**

Oleh:

RAMLI YUSUF

Dosen FTIK IAIN Ternate
(ramliyusuf2017@gmail.com)

YUSRI HABIBI

Mahasiswa IAIN Ternate
(yusri@gmail.com)

Abstract

One of the weaknesses of the education system in schools so far is the lack of appreciation and place the potential of other intelligences equal to the intelligence of mathematical-logical intelligence. As a result students are forced to master and pursue achievements in mathematics and science. While in other parts of the subject in the form of arts, culture and sports skills, it is also expected to participate in developing a number of multi-intelligence potentials that are not visible in the implementation of the learning process. namely: (1) education as general goods and services (public goods), (2) education as productive goods and services (productive goods), and (3) education as capital goods or services. These three concepts can be used as a basis for consideration in determining the scale of priorities in education development, including the division of responsibilities for the development of human resources between the government and the community.

Keywords: Education. HR investment

Abstrak

Salah satu kelemahan sistem pendidikan di sekolah selama ini adalah kurang mengapresiasi dan menempatkan potensi kecerdasan lain setara dengan kecerdasan inteligensi matematik-logis. Akibatnya siswa dipaksakan untuk menguasai dan mengejar prestasi pada mata pelajaran matematika dan Sains. Sementara pada bagian mata pelajaran lain berupa keterampilan seni, budaya dan olah raga sesungguhnya juga diharapkan untuk turut mengembangkan sejumlah potensi yang bersifat *multi inteligensi* justru tidak terlihat dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Namun pengembangan investasi SDM melalui pendidikan ke depan harus diarahkan pada tiga konsep dalam ekonomi public yaitu: (1) pendidikan sebagai barang dan jasa umum (*public goods*), (2) pendidikan sebagai barang dan jasa produktif (*productive goods*), dan (3) pendidikan sebagai barang atau jasa capital (*capital goods*). Ketiga konsep ini dapat digunakan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan pendidikan, termasuk pembagian tanggungjawab untuk pengembangan SDM antara pemerintah dengan masyarakat.

Kata Kunci :Pendidikan. Investasi SDM

A. Realitas Pendidikan Sekolah

Arah kebijakan pendidikan kita saat ini dan ke depan diharapkan mampu menghasilkan siswa yang bermoral, cerdas, terampil, professional, mencintai budaya serta memiliki keunggulan secara kompetitif untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja global. Dalam konteks ini proses pembelajaran di sekolah harus lebih bersifat kreatif agar dapat mengembangkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik siswa secara sempurna. Sepanjang pengamatan kita pengembangan terhadap ketiga potensi tersebut tampak berjalan tidak seimbang. Sehingga aspek kecerdasan inteligensi masih lebih dominan menjadi target untuk mencapai hasil belajar maksimal dibandingkan dengan sikap dan keterampilan.

Karena itu perlu dilakukan reevaluasi kembali terhadap proses pembelajaran agar mampu mensinergikan semua potensi tersebut, baik kecerdasan inteligensi (IQ), kecerdasan Emasional (EQ), dan kecerdasan Spiritual (SQ). Berbagai kecerdasan inilah yang merupakan *entry point* dan harus diletakan sebagaibagian integral dari proses pembelajaran yang menjadi sasaran tujuan pendidikan. Untuk membangun sosok kepribadian manusia secara utuh tidak bisa menggunakan indicator factor kecerdasan inteligensi atau kepintaran berdasarkan penilaian prestasi tertentu, misalnya pada kelompok mata pelajaran eksakta semata. Sebab konsep kecerdasan itu mengandung pengertian sangat kompleks. Sehingga boleh jadi seorang siswa bila dilihat dari sisi kemampuan kecerdesan berhitung lemah, tetapi memiliki kelebihan pada kecerdasan music, seni, budaya, keterampilan, pergaulan social, dan komunikasi . Gardner dalam Saifuddin Azwar (2004:2), berhasil mengidentifikasi dan memetakan tujuh jenis kecerdasan inteligensi yaitu; (1) inteligensi linguistic, (2) inteligensi matematik-logis, (3) inteligensi *spatial*, (4) inteligensi music, (5) inteligensi kelincahan tubuh, (6) inteligensi interpersonal, dan (7) inteligensi intrapersonal. . Dari temuan penelitian ini menunjukkan

potensi kecerdasan inteligensi manusia cukup beragam sehingga dalam proses pendidikan, pendaaygunaan terhadap seluruh fungsi kecerdasan itu dikembangkan secara seimbang dan produktif tanpa harus didiskreditkan antara satu dengan yang lain.

Kelemahan pendidikan di sekolah selama ini adalah kurang mengapresiasi dan menempatkan potensi kecerdasan lain setara dengan kecerdasan inteligensi matematik-logis. Akibatnya siswa dipaksakan unftuk menguasai dan mengejar prestasi pada mata pelajaran matematika dan Sains.Sementara pada bagian mata pelajaran lain berupa keterampilan seni, budaya dan olah raga sesungguhnya juga diharapkan untuk turut mengembangkan sejumlahpotensi yang bersifat *multi inteligensi* justru tidak terlihat dalam pelaksanaan proses pembelajaran.Pada hal hasil risetyang dilakukan Daniel Goleman pada Indra Djati Sidi (2003:7), mengungkapkan bahwa kontribusi kecerdasan inteligensi berupa *Hard Skilly* yakni pengetahuan dan keterampilan teknis terhadap keberhasilan seseorang hanya 20 %, sisanya 80 % adalah keterampilan mengelola diri (*soft skill*).

Pendekatan *multi inteligens*ni akan lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kreativitas bakat, minat, termasuk perubahan perilaku secara menyeluruh. J Bunner dalam Slameto(2003:11), mengatakan sebaiknya sekolah dapat menyediakan peluang bagi siswa untuk maju dengan cepat sesuai kemampuan dalam mata pelajaran tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran akan lebih efektif apabila seorang guru mengenal dengan jelas adanya perbedaan kemampuan inteligensi siswa dan mampu mendorong tingkat partisipasi aktif,bebas berinteraksi dengan materi pelajaran yang diberikan tanpa harus dipaksakan.

Dalam upaya meningkatkan aktivitas belajar dibutuhkan keberadaan lingkungan yang dinamakan "*discovery learning invironment*". Lingkungan harus kondusif agar memungkinkan siswa merasa aman, nyaman, mampu bertahanuntuk melakukan kegiatan

belajar, observasi, eksperimen, dan bereksplorasi dengan temuan-temuan baru yang belum dikenal atau pernah diketahui sebelumnya. Tugas guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan pendidikan sekolah menjadi pusat kekuatan yang memberi inspirasi bagi siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menumbuhkan budaya membaca, menulis serta meneliti sebagai modal dasar pembangunan sumberdaya manusia dalam meningkatkan kepercayaan diri (*self confidence*).

Menurut Saifuddin Azwar(2004:71) bahwa dikalangan psikolog, perdebatan klasik mengenai factor lingkungan atau bawaan (turunan) mempengaruhi kecerdasan inteligensi seseorang telah diakui secara obyektif tanpa saling mengklaim secara ekstrim akan kebenaran pandangan masing-masing. Trend perdebatan yang cukup kontroversial tersebut mulai mencair, dan berkembang justru lebih mengerucut untuk menemukan factor manakah yang dianggap paling dominan mempengaruhi perbedaan tingkat inteligensi setiap orang, apakah keturunan atau lingkungan.

Perbedaan kecerdasan multi inteligensi ini patut mendapat perhatian serius dikalangan guru untuk pengembangan fungsi belahan otak kanan dan otak kiri. Mengingat dalam kurikulum pendidikan modern kurang mengakomodir atau memberi ruang terhadap perkembangan potensi kecerdasan inteligensi lain misalnya; inteligensi *spatial*. Fungsi *inteligensi spatial* ini merepresentasikan belahan otak kanan, sehingga akan membuat siswa berpikir inspiratif, terampil, dan berjiwa seni. Bahkan dalam hal kepemimpinanpun mereka sangat berbakat, cepat mengambil inisiatif untuk mencari metode, yang lebih taktis dan strategi dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi. Ketika terjadi gangguan pada belahan otak kanan, maka *inteligensi spatial* otomatis mengalami disfungsional.

Sebaliknya fungsi otak kiri untuk mengkonstruksi gagasan berpikir yang abstrak, filosofis, logis dan matematis sangat dibutuhkan oleh siswa, tetapi tingkat determinasi

perlakuan terhadap kecerdasan inteligensi jangan sampai mengabaikan atau menganggap remeh keberadaan potensi kecerdasan fungsi otak kanan. Karena itu, perlu disadari bahwa proses pembelajaran tidak pernah berlangsung di ruang yang kosong sehingga siswa harus dilatih, dibimbing agar terus termotivasi kemampuan inteligensiyang beragam itu untuk mencermati, mempelajari, memahami dan menganalisis berbagai gejala dan fenomena social yang sedang terjadi di lingkungan sekitar sampai menemukan alternative pemecahan masalah (*problem solving*).

Ditengah situasi bangsa menghadapi krisis multidimensional, sudah saat kita kembali melakukan koreksi total terhadap system evaluasi pembelajaran di sekolah. Paradigma pendidikan yang cenderung memberi perioritas secara berlebihan untuk menilai hasil belajar berdasarkan kecerdasan otak kiri justru terbukti gagal. Dampak ketidakseimbangan system pendidikan seperti itu sudah banyak dirasakan masyarakat. Sekolah yang menjadi tumpuan dan harapan masyarakat untuk menghasilkan siswa yang kreatif, produktif, memiliki jiwa wirausaha (*entrepreunership*) serta terbuka peluang memperoleh kesempatan kerja malah menambah beban pembangunan .

Menurut Fasli Jalal dan Dedi Supria (Yogyakarta: 87), Pendidikan harus berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan pembangunan ekonomi. Upaya mempersiapkan tenaga kerja yang bermutu, mempunyai tingkat keunggulan kompetitif sesuai dengan arah perubahan struktur ekonomi menjadi tugas pendidikan nasional. Itulah sebabnya kita membutuhkan kurikulum pendidikan sekolah yang pro aktif pada pembangunan ekonomi, supaya tercipta tenaga kerja terampil, produktif dengan memperhatikan komposisi dan struktur kompetensi professional yang lebih mendekati kebutuhan dan peluang yang tersedia dipasar kerja baik ditingkat local, nasional, regional dan internasional.

Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa banyak lulusan yang dihasilkan sekolah setiap tahun masih sangat kecil terserap masuk dipasar kerja. Bahkan kondisi saat ini memang berbanding terbalik, karena disatu sisi kita berharap pendidikan mampu berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru dengan menghasilkan lulusan yang bermutu. Sementara disisi lain kebijakan pemerintah untuk memberdayakan mutu lulusan masih jauh panggang dari api karena factor keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga memicu peningkatan angka pengangguran anak usia sekolah.

Mereka mestinya harus mendapat kesempatan mengenyam bangku pendidikan tinggi justru terhambat akibat tidak memiliki kemampuan ekonomi. Kurikulum pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) yang diberikan disekolah selama ini belum mampu memberdayakan kemandirian anak untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat sesuai keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Mereka justru kehilangan jati diri sebagai manusia. Ini terlihat dari sering muncul sikap pesimisme, tidak bersemangat dan berusaha untuk merubah nasib, muncul perasaan minder, mudah putusasah, bahkan semakin menjauhkan mereka dari prinsip-prinsip hidup yang bermanfaat dan produktif. Paling tidak kehidupan yang dilalui itu menurut agama bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri

B. Pendidikan Investasi SDM

Konsep pendidikan pada prinsipnya bertujuan untuk membangun investasi sumberdaya manusia (*human capital investment*) yang berkualitas secara utuh, menyeluruh dan produktif. Tidak hanya aspek pengetahuan dan keterampilan saja tetapi juga pembentukan perilaku. Berinvestasi dengan SDM dalam pendidikan tidak langsung memperoleh keuntungan secara ekonomis sebagaimana mengembangkan modal usaha berbentuk jasa atau barang sehingga hasil yang dicapai lebih terukur. Dalam konteks ini, kebanyakan prinsip pemahaman orang sangat berbeda baik dilihat dari sisi waktu, substansi, maupun hasil yang didapatkan.

Dari segi waktu misalnya, nilai investasi yang ditanamkan melalui pendidikan membutuhkan proses panjang dan berkesinambungan karena menyangkut pembentukan perilaku manusia. Tidak bisa seketika pendidikan langsung berhasil menciptakan *output* yang memberikan nilai balik secara ekonomis (*rate of return*) terhadap biaya yang dikeluarkan. Melainkan dibutuhkan waktu panjang (*long time*), karena pendidikan dianggap efektif dalam membentuk dan melakukan perubahan. Sedangkan substansi perubahan terkait dengan perilaku sumberdaya manusia yang diinginkan melalui proses pembelajaran. Pada tataran implementasi pendidikan faktor pembelajaran merupakan sarana terpenting dan memiliki nilai strategis sehingga tujuannya bisa berhasil mengubah keadaan, memperbaiki kualitas hidup manusia baik secara structural, cultural maupun emosional

Menurut Bank Dunia (*world Bank*), manusia jangan diberikan alat ataupun kemudahan fasilitas karena dia hanya mampu membuat perubahan kecil. Bekalilah mereka dengan investasi pendidikan, maka mereka pasti mengubah tingkah laku. Dengan perubahan tingkah laku itulah, mereka akan mampu mengubah dunia. Menurut Veithzal Rivai dan Sylviana Murni (2009:778) mengatakan perubahan tingkah laku yang dimaksud adalah bentuk perubahan yang dapat menembus batas, ruang dan waktu. Sebab nilai investasi pendidikan yang ditanamkan indikatornya bisa dilihat dari hasil peningkatan pendapatan, perbaikan kesejahteraan, menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, membuka kesempatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru, mengembangkan potensi yang dimiliki dan mampu memperbaiki kualitas sumberdaya manusia kearah hidup yang lebih kondusif untuk merebut masa depan yang cerah.

Investasi SDM melalui pendidikan dapat dibedakan dengan mengacu kepada tiga konsep dalam ekonomi public yaitu: (1) pendidikan sebagai barang dan jasa umum (*public goods*), (2) pendidikan sebagai barang dan jasa produktif (*productive goods*), dan (3)

pendidikan sebagai barang atau jasa capital (*capital goods*). Ketiga konsep ini dapat digunakan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan pendidikan, termasuk pembagian tanggungjawab untuk pengembangan SDM antara pemerintah dengan masyarakat.

D.B Hol Singer dalam Umberto Sihombing(2003:3), mengatakan pendidikan merupakan barang konsumsi dan barang investasi. Sebagai barang konsumsi (*consumtion goods*) pendidikan menjadi kebutuhan setiap manusia. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat akibat dinamika pembangunan, maka semakin besar pula kebutuhan orang akan pendidikan. Kemudian pendidikan sebagai barang investasi (*investment goods*) yang berarti sejumlah pengeluaran untuk mendukung pendidikan yang dilakukan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam jangka pendek tentu diharapkan mendapat manfaat bagi kepentingan jangka panjang.

Selama ini mungkin pendekatan pemahaman kita lebih pada fungsi pendidikan sebagai barang atau jasa capital (*capital goods*). Atau justru menjadikan pendidikan sebagai barang konsumsi dan barang investasi. Sehingga dinilai penuh dengan segala kepentingan baik secara individu maupun kelompok terutama penyelenggara pendidikan di sekolah. Kepentingan ini yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk menambah pemasukan dalam bentuk pungutan baik yang bersifat legal ataupun ilegal dengan alasan kekurangan dana.

Ternyata langkah tersebut juga sudah banyak menuai kritik berbagai kalangan, bahkan terkesan praktek tata kelola lembaga pendidikan seperti ini terlalu cenderung membebani masyarakat. Sejumlah kebijakan tentang pungutan terhadap siswa, mulai dari uang komite, biaya buku, pendaftaran siswa baru, uang sarana, praktek mata pelajaran tertentu dan ujian. Pada hal biaya operasional sekolah (BOS) yang disubsidi oleh pemerintah cukup banyak. Bantuan ini sesungguhnya harus dimanfaatkan untuk

menjawab kepentingan beberapa kebutuhan siswa dimaksud agar tidak lagi dilakukan pungutan. Nilai pungutan tersebut jumlahnya bervariasi. Disalah satu SMA Negeri di Kota Ternate ini memungut uang komite per siswa Rp. 150.000/bulan. Jika ditotal, maka dalam satu semester mencapai Rp. 900.000.

Itu baru satu jenis dari sekian banyak jenis pungutan. Jadi uang komite untuk tingkat SMA jauh lebih besar bila dibandingkan dengan SPP mahasiswa STAIN dalam satu semester hanya Rp. 600.000. Sementara di perguruan tinggi, kebijakan mengenai privatisasi pendidikan dianggap lebih baik daripada dikuasai Negara. Perubahan status PTN menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dinilai oleh Darmaningktiyas

(2005 : 248) sebagai bentuk penguatan terhadap system kapitalisme dapat bekerja secara baik dan mampu merambah dunia pendidikan. Dikalangan ekonom proliberalis sangat yakin akan perubahan status tersebut berdampak lebih baik bagi perkembangan pendidikan tinggi ke depan. Tetapi bagaimana nasib masyarakat miskin justru merasa terancam, karena akses mereka untuk dapat belajar di perguruan tinggi Negeri dengan biaya terjangkau semakin sulit. Bahkan ini akan memperlebar praktek ketidakadilan dalam dunia pendidikan nasional.

Apalagi masuknya sejumlah pengusaha asing dan domestic yang konseren mendukung program pemerintah disektor pendidikan. Mereka menunjukkan sikap peduli sebagai salah satu bentuk partisipasi dunia usaha dengan tujuan untuk membangun kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, disatu sisi merupakan langkah positif. Namun disisi lain justru berdampak negatif secara langsung terhadap peningkatan beban biaya pendidikan semakin bertambah mahal dan sulit dihindari. Hal ini terlihat sangat jelas terutama dikota-kota besar seperti Jakarta karena investasi yang dikelola untuk membangun infrastruktur sekolah swasta itu jauh lebih megah dibandingkan dengan sekolah negeri milik pemerintah.

Ketersediaan sejumlah sarana dan fasilitas belajar yang memadai didukung dengan tenaga pendidik yang bermutu, membuat orang yang memiliki kemampuan ekonomi tetap berminat meskipun mahal. Lain halnya bagi kaum ekonomi lemah tentu tidak semudah itu memilih sekolah swasta karena pasti tidak akan sanggup, meskipun mungkin anak-anak mereka sangat berprestasi. Sedangkan golongan masyarakat menengah ke atas justru menginginkan hasil pendidikan yang bermutu, unggul, kompetitif dan siap pakai. Maka bagi mereka, biaya pendidikan mahal bukan merupakan kendala. Karena yang diharapkan adalah kepuasan mendapatkan standar pelayanan pendidikan bermutu baik bertaraf nasional maupun internasional

Cara pandang tentang industrialisasi pendidikan yang berorientasi *profit* tersebut memang tidak salah. Hanya saja perlu diingat, karena analisis perencanaan dalam setiap pembiayaan *unit cost* sekecil apapun yang dikeluarkan untuk kebutuhan pendidikan harus dihitung terutama bagi PT swasta terkecuali PT Negeri yang anggarannya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk kondisi saat ini hampir sulit dibedakan lagi mahalnya biaya investasi pendidikan antara PT Negeri dengan PT swasta. Program pendidikan gratis yang sering dikompanyekan pemerintah lebih bersifat hiasan bibir (*lip service*) atau slogan politik saja, karena faktanya dimana-mana masih terjadi pungutan di sekolah sehingga kebijakan itu sulit untuk direalisasikan secara maksimal.

Ahmad S. Ruky (2002:258) ,mengatakan, dari segi mutu pendidikan kita diakui masih kalah bersaing dengan bangsa lain. Indikatornya bisa dilihat dari sector kebutuhan tenaga kerja. Indonesia sampai sekarang terus mengimpor tenaga kerja asing (TKA). Ada dua factor yang menyebabkan mengalirnya TKA bekerja di Indonesia. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi kita ditandai dengan masuknya sebagian besar investasi yang berbentuk modal asing sesuai UU PMA 1967. Regulasi mengenai PMA (penanaman modal asing) membuka kesempatan bagi kehadiran TKA. *Kedua*, masuknya modal asing

itu mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga terjadi kelangkaan tenaga kerja untuk level-level tertentu.

Persaingan pasar tenaga kerja menjadi isu hangat yang sudah lama diperbincangkan dikalangan para investor. Richard Crawford dalam Indra Djati Sidi (2002: 77), mengemukakan bahwa pada abad 21 disebut *Era of Human Capital*, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya telekomunikasi berkembang sangat pesat. Akibat dari perkembangan itu menyebabkan semakin deras arus informasi dan terbukanya pasar internasional yang menimbulkan dampak persaingan bebas begitu ketat dalam segala aspek kehidupan manusia. Proses transformasi besar-besaran terjadi diabad ini, sehingga *Human Capital* merupakan pusat perubahan masyarakat agraris menuju masyarakat industri (*industrial society*), kemudian beralih ke masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*).

Konsekwensi logisnya adalah, keberadaan sumberdaya manusia Indonesia yang unggul, kompetitif dan professional diinvestasikan melalui pendidikan menjadi kekuatan penting dan sangat strategis untuk menentukan pembangunan bangsa. Dalam pandangan William G. Ouchi, penempatan manusia sebagai sumberdaya tenaga kerja adalah kunci dari peningkatan produktivitas. Mc Kinsey Global Institute (September 2012) melakukan analisis dan kajian mendalam tentang potensi SDM yang dimiliki Indonesia pada tahun 2030 dibandingkan 2012 mengalami pergeseran.

Berdasarkan laporan tersebut, peringkat kekuatan ekonomi Indonesia menempati posisi ke 16 membaik menjadi posisi ke 7. Dengan penguatan perekonomian, jumlah konsumenpun meningkat dari 45 juta menjadi 135 juta. Diikuti dengan pergerakan arus urbanisasi sehingga memicu terjadinya peningkatan jumlah penduduk di kota dari 53 % menjadi 71 %. Hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap PDB juga akan meningkat dari 74 % menjadi 86 %. Sehingga mampu mendorong transaksi

perdagangan pasar terus berkembang dari USD 0,5 triliun menjadi USD 1,8 triliun. Perkembangan tersebut berdampak pada kebutuhan tenaga kerja terampil dari 55 menjadi 113 juta orang.

Analisis ini dilengkapi dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja menurut jenjang pendidikan di tahun 2030. Maka Indonesia akan menyerap kebutuhan tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi sebanyak 25 juta, tetapi hanya mampu dipenuhi 23 juta. Untuk tamatan SMA umum dibutuhkan tenaga kerja terampil sebesar 35 juta, namun yang terisi sekitar 25 juta orang. Sedangkan tamatan SMK yang dibutuhkan sebanyak 17 juta orang, tetapi kita mengalami *over production* sebesar 30 juta orang, sehingga terjadi kelebihan *supply demand* 13 juta. Untuk tingkat SMP tenaga kerja yang akan tersedia 20 juta melebihi dari 39 juta yang diperlukan.

Hasil analisis tentang proyeksi peluang pasar kerja menggunakan angka-angka statistic di atas justru membuat kita terkejut. Dengan kondisi pelayanan dan kebijakan tata kelola pelaksanaan pendidikan seperti ini, maka *over supply* lulusan SMK dan SMP pada tahun 2030 akan benar-benar terjadi. Sebaliknya Indonesia mengalami kekurangan tenaga kerja tamatan SMA dan pendidikan tinggi. Akibatnya pemerintah tidak pernah berhenti mengeksport jasa tenaga kerja ke luar negeri hanya bermodalkan pendidikan SMP dan SMK.

Demikian pula dari segi mutu sumberdaya manusia, tenaga kerja Indonesia masih sangat rendah bila dibandingkan Negara lain baik dalam hal penguasaan keterampilan yang dibutuhkan maupun kemampuan berbahasa asing. Rata-rata tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri adalah lulusan SMP/SMA atau sederajat. dan kebanyakan mereka bekerja bukan di sektor industry melainkan sebagai pembantu rumah tangga, *clining service* atau buruh bangunan. Namun demikian mereka cukup berjasa,

bahkan disebut pahlawan devisa, karena kontribusinya terhadap Negara dalam bentuk pajak penghasilan.

C. Pendidikan Masa Depan

Pengembangan sumberdaya manusia dalam pendidikan terus berlangsung sepanjang hayat, berinteraksi dengan berbagai siklus kehidupan dan mengarah padaperubahan seluruh aspek pembangunan yang satu sama lain saling terkait. Misalnya pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja industry, pelatihan manajemen wirausaha mandiri, kesehatan dan gizi serta sejumlah bidang tertentu yang kemungkinan memiliki peluang untuk dikembangkan secara bersinergi. Pendidikan ke depan bukan saja mampu membangun peradaban manusia, tetapi sekaligus menjadi pusat gerakan restorasi pembangunan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keberhasilan pembangunan tidak akan mungkin dapat tercapai tanpa didukung oleh kemampuan SDM yang berkualitas dan professional yang dibentuk melalui peran pendidikan yang kuat. Karena itu diperlukan perubahan paradigma baru pemikiran kita tentang pembangunan pendidikan untuk meningkatkan fungsinya sebagai katalisator bagi pengembangan sumberdaya manusia secara menyeluruh. Kita tentu menyadari bahwa pendidikan pada masa yang lalu lebih dipandang semata-mata sebagai langkah pemerintah mencerdaskan masyarakat tanpa harus dikaitkan dengan pembangunan sector lain, misalnya pembangunan ekonomi, politik, social dan budaya.

Perspektif pemikiran tersebut terlalu mengedepankan tujuan pendidikan yang bersifat ke dalam (*inward looking*) yakni bagaimana mendidik manusia agar cerdas, berkepribadian dan memiliki wawasan pengetahuan luas, tanpa mempersoalkan apakah adamanfaat atau tidak secara langsung dari kecerdasan, pengetahuan dan kepribadian terhadap pembangunan diberbagai sector kehidupan. Sehingga tidak dianggap menjadi isu kebijakan pendidikan yang krusial dan urgen. Kini perkembangan jaman terus

berubah, dan hampir disemua lini kehidupan selalu membutuhkan hubungan saling ketergantungan (*interdependent*) satu sama lain yang terbangun di dalam sebuah system yang integral.

Dalam kerangka itulah gagasan mengenai pembangunan sector pendidikan harus lebih berorientasi keluar (*outward looking*) mengingat keberadaannya hanya merupakan salah satu subsistem yang tak terpisahkan dari system pembangunan social-ekonomi yang luas dan kompleks sedang dihadapi oleh masyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut, maka pendidikan diharapkan harus mampu menghasilkan SDM yang bukan menjadi beban pembangunan tetapi sebaliknya berfungsi sebagai sumber kekuatan penggerak (*driving force*) bagi keseluruhan proses pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Pada titik inilah menurut Asep Suryadi (2004:99), perlu dikembangkan konsep pendidikan yang disebut dengan efisiensi eksternal (*external efficiency*), sehingga penekanannya lebih pada hubungan timbalik balik antara pendidikan dengan pembangunan dalam berbagai bidang baik politik, ekonomi, social-budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep ini mengemuka karena didasari oleh suatu pemikiran untuk memayungi berbagai isu kebijakan penting serta program-program prioritas dalam pembangunan pendidikan, seperti pemerataan kesempatan belajar, mutu dan unggulan, serta efisiensi manajemen pendidikan.

Indra Djati Sidi (2003:14), Berpijak pada berbagai permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka pendidikan masa depan mestinya perlu direkonstruksi ulang untuk mengembangkan paradigma baru pembelajaran yang lebih seimbang dan proporsional dengan memberdayakan seluruh potensi kecerdasan yang dimiliki siswa. Bangunan pendidikan yang dipahami selama ini berpedoman pada konsep *input-output analysis* atau apa yang disebut dengan *education production functio*. Cara pandang ini

terilhami oleh teori ekonomi produksi, sehingga begitu yakin bahwa apabila aspek *input* diperbaiki otomatis *output* akan menjadi lebih baik. Menurut J. Alan Thomas dalam Oemar Hamalik(1991:9) pendidikan sekolah memproses siswa menjadi *output* atau produk tertentu, yakni menghasilkan lulusan yang memiliki performans yang diharapkan.

Meskipun landasan teori tersebut dianggap berhasil dalam dunia industry, tetapi belum tentu selalu terbukti ketika diterapkan melalui pendidikan. Hal ini disebabkan karena lembaga pendidikan sekolah jangan disamakan dengan pabrik dalam sector industry. Apalagi *input* pendidikan sekolah itu bukan bersifat statis melainkan sangat dinamis akibat dipengaruhi oleh banyak factor, terutama elemen proses dan konteks pendidikan. Karena itu persoalan penting yang perlu dipikirkan adalah kurikulum, mutu guru, metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan serta manajemen pendidikan.

Menurut Wina Sanjaya (2005:97), Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) harus terus difokuskan pada pengalaman belajar siswa sesuai dengan prinsip belajar sepanjang hayat dan tetap mengacu kepada empat pilar pendidikan universal sebagaimana telah dicanangkan oleh Unesco, yaitu; (1) *learning to know*, yang berarti juga *learning to learn*, (2) *learning to do*, (3) *learning to be*, dan (4) *learning to live together*.

Learning to know atau *learning to learn*, artinya belajar yang dilakukan siswa itu tidak hanya sekedar menghasilkan sesuatu yang mungkin belum pernah diketahui sebelumnya. Tetapi dengan belajar dimaksudkan agar siswa juga dapat menyadari akan kemampuan tentang cara bagaimana mempelajarinya. Berdasarkan kemampuan itulah maka tumbuh rasa percaya diri (*self confidence*) sehinggamemungkinkan proses belajar yang dilalui siswa senantiasa belangsung secara continue tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Konotasi belajar untuk mengetahui juga sama dengan istilah *learning to think* atau belajar berpikir.

Learning to do, mengandung pengertian bahwa belajar itu selain mendengar, melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, juga dimaksudkan untuk dapat melakukan sesuatu sebagai bagian dari tuntutan penguasaan kompetensi yang sangat diperlukan terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar kerja global. Disinilah *learning to do* yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran lebih diorientasikan kepada pemberdayaan pengalaman dan keterampilan bagi siswa untuk hidup mandiri.

Learning to be, bermakna bahwa belajar merupakan suatu proses pembentukan kepribadian supaya manusia mampu mengenal diri sendiri. Atau dengan kata lain belajar untuk mengaktualisasikan diri sendiri sebagai individu yang memiliki kepribadian dan kesadaran akan tanggungjawab menjadi pemimpin, sekaligus juga dapat menyadari segala kekurangan dan kelemahannya.

Learning to live together, adalah belajar untuk bagaimana hidup bersama manusia lain baik secara individu maupun sebagai makhluk social. Karena tidak mungkin orang bisa hidup sendiri atau mengasingkan diri tanpa bantuan sesamanya. Dalam konteks yang lebih luas kehidupan bersama ditengah masyarakat membentuk perilaku manusia agar bersikap demokratis untuk saling menghargai dan memahami perbedaan pendapat tanpa paksaan.

D. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Arah kebijakan pendidikan kita saat ini dan ke depan diharapkan mampu menghasilkan siswa yang bermoral, cerdas, terampil, professional, mencintai budaya serta memiliki keunggulan secara kompetitif untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja global.

Proses pembelajaran di sekolah harus bersifat kreatif sehingga dapat mensinergikan dan menyeimbangkan semua potensi kecerdasan, baik *inteligensi question* (IQ), *Emasional question*(EQ), dan *Spiritual question* (SQ).

Konsep pendidikan pada prinsipnya bertujuan untuk membangun investasi sumberdaya manusia (*human capital investment*) yang berkualitas secara utuh, menyeluruh dan produktif. Tidak hanya aspek pengetahuan dan keterampilan saja tetapi juga pembentukan perilaku.

Pendidikan ke depan bukan saja mampumembangun peradaban manusia, tetapi sekaligus menjadi pusat gerakan restorasi pembangunan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam mengembangkan budaya belajar sepanjang hayat tetap mengacu kepada empat pilar pendidikan universal yang telah dicanangkan oleh Unesco, yaitu; (1) *learning to know*, yang berarti juga *learning to learn*, (2) *learning to do*, (3) *learning to be*, dan (4) *learning to live together*.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Saifuddin, *Pengantar Psikologi Intelligensi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Budimansyah Dasim dan Asep Suryadi, *Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru*, Bandung: Grasindo, 2004
- Darmaningtiyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan*, (Yogyakarta: LKiS, 2005)
- Dedi Supriyadi dan Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Hamalik Oemar, *Perencanaan Dan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Mandar Maju, 1991
- Irianto Bambang, *Mampukah Memimpin di Negeri Sendiri*, Posko malut, tanggal 28 Agustus 2013
- Murni Sylviana dan Veithzal Rivai, *Education Management Analisis Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Ruky S. Ahmad , *Sukses Sebagai Manajer Profesional Tanpa Gelar MM atau MBA*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Sidi Djati Indra, *Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Jakarta:Paramadina, 2003
- Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Jakarta Rineka Cipta, 2003
- Sanjaya Wina, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Umberto Sihombing, *Pembiayaan Pendidikan*, Jakarta, 2003,
- .